

**BUDAYA POLITIK MAHASISWA MELAYU
PADA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP)
UNIVERSITAS RIAU (UR)**

Irwan Iskandar

Dosen Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Abstrak

Politik telah mempengaruhi pola pikir, sikap dan tindakan politik sehari-hari masyarakat. Pengaruh politik terhadap pikir, sikap dan tindakan politik inilah yang kemudian disebut sebagai budaya politik. Fenomena yang sama dijumpai terkhusus pada mahasiswa Melayu—sebagai bagian dari masyarakat Melayu—yang sedang menimba ilmu pengetahuan di berbagai program studi di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Riau (UR). Oleh karena itu, penelitian ini menjawab; persepsi mahasiswa Melayu terkait politik, pileg dan pilpres; orientasi politik yang muncul dari persepsi tersebut; dan tipe budaya politik yang sesuai dengan mahasiswa Melayu.

Untuk itu, metode yang digunakan oleh penelitian ini adalah Penelitian Deskriptif (Descriptive Research) dengan sampel responden diambil secara non random atau tidak acak yang tidak memberikan peluang yang sama bagi setiap sampel untuk dipilih. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dimana data dinyatakan dalam bentuk verbal sebagai interpretasi responden yang tercatat dan tanpa menggunakan teknik statistik. Selain data tersebut, data sekunder berupa sumber-sumber tertulis baik dari buku-buku, tulisan ilmiah, jurnal, dokumen-dokumen resmi dan terbitan-terbitan lainnya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa politik merupakan aspek yang penting dalam kehidupan sehari-hari mahasiswa Melayu di FISIP UR. Walaupun demikian, mahasiswa Melayu di FISIP UR tidak berperan serta secara aktif dalam berpolitik praktis. Sehingga demikian, orientasi politik yang muncul adalah Orientasi Afektif. Berdasarkan tipe orientasi politik afektif yang dimiliki mahasiswa Melayu di FISIP UR tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tipe budaya politik yang sesuai adalah tipe Kebudayaan Politik Subyek/Kaula (Subject Political Culture).

Kata Kunci: Melayu, Budaya Politik, Orientasi Politik, Universitas Riau

PENDAHULUAN

Budaya dan politik merupakan dua tema yang berbeda di di tengah-tengah masyarakat. Budaya di kalangan masyarakat biasanya identik dengan perayaan-perayaan/upacara-upacara adat istiadat, tata krama atau sopan santun dan kesenian.

Sementara itu, politik dianggap sebagai suatu upaya untuk memperoleh dan menjalankan kekuasaan.

Dalam ranah ilmu pengetahuan istilah budaya dan politik pun memang berbeda karena memiliki aspek epistemologi, ontologi dan aksiologi yang terpisah. Walaupun demikian, para pakar ilmu politik telah berhasil “mengawinkan” antara budaya dan politik sehingga menghasilkan kajian dan teori budaya politik. Lebih lanjut, menurut Efriza, istilah-istilah budaya politik meliputi lima belas bahasan, yaitu: (1) *Sosialisasi, internalisasi dan institusional*; (2) *Persepsi tentang kekuasaan*; (3) *Posisi agama dan kebudayaan daerah*; (4) *Integrasi antar elit politik*; (5) *Integrasi elit-elit massa*; (6) *Masalah pemerataan dan keadilan*; (7) *Ideologi*; (8) *Komunikasi Politik*; (9) *Pilihan politik seseorang*; (10) *Persepsi tentang legitimasi*; (11) *Proses Pembuatan Kebijakan Pemerintah*; (12) *Kegiatan partai-partai politik*; (13) *Perilaku aparat negara*; (14) *Gejolak masyarakat terhadap kekuasaan yang memerintah*; dan (15) *Variabel sistem politik*.¹

Sehingga demikian, akan menjadi sebuah input yang menarik apabila budaya politik yang muncul pada sebuah masyarakat tertentu di Indonesia dapat dikaji berdasarkan fenomena politik yang mengelilingi masyarakat tersebut, terutama di tahun 2014 yang juga dikenal dengan “Tahun Politik”. Hal ini dikarenakan pada tahun ini telah diselenggarakan dua pemilihan umum yang berskala nasional, yakni Pileg (Pemilihan Umum Legislatif) dan Pilpres (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden) untuk masa bakti 2014 hingga 2019.

Pada Pileg, sebagaimana diketahui, telah dipilih caleg (calon legislatif) dari parpol (partai politik) tertentu untuk; DPRD II (tingkat Kabupaten/Kotamadya), DPRD I (tingkat Provinsi) dan DPR RI (tingkat nasional) serta anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah) atau juga bisa dikatakan “senat”—walaupun tidak bisa disamakan dengan senat ala AS (Amerika Serikat)—karena sebagai perwakilan tiap-tiap daerah di Indonesia.

Mereka (rakyat Indonesia) harus memilih paling tidak parpol atau pun langsung kepada caleg yang telah diusung oleh partai-partai tertentu. Pada pileg tahun ini terdaftar 12 partai yang bertarung secara nasional dan ditambah 3 partai lokal khusus untuk pemilihan daerah Provinsi Aceh. Partai-partai tersebut antara lain²:

1. Partai Nasional Demokrat (NasDem)
2. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
3. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
4. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
5. Partai Golongan Karya (Golkar)

¹ Efriza. *Political Explore: Sebuah Kajian Ilmu Politik*. Bandung: CV Alfabeta, 2012. Halaman 97-98.

² <http://kpu.go.id/dmdocuments/15%20Parpol%20peserta%20pemilu.pdf>, diakses pada 20 Juni 2014 jam 20.48

6. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
7. Partai Demokrat
8. Partai Amanat Nasional (PAN)
9. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
10. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
11. Partai Bulan Bintang (PBB)
12. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)

Dan 3 partai lokal, yaitu:

1. Partai Damai Aceh (PDA)
2. Partai Nasional Aceh (PNA)
3. Partai Aceh (PA)

Sedangkan pada pilpres akan dipilih diantara dua capres (calon Presiden) dan cawapres (calon Wakil Presiden), yakni Prabowo Subianto-Hatta Rajasa sebagai pasangan capres-cawapres nomor urut 1 dan, Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai pasangan capres-cawapres nomor urut 2.

Rakyat Indonesia yang sudah termasuk kategori pemilih telah diajak untuk memilih caleg di bilik suara yang telah disediakan oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum) di tiap-tiap TPS (Tempat Pemungutan Suara) dengan membawakan bukti terdaftar sebagai pemilih yang disediakan oleh KPU atau cukup dengan membawakan KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang sah.

Fenomena yang sama dijumpai terkhusus pada mahasiswa Melayu yang sedang menimba ilmu penguasaan di berbagai program studi di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Riau (UR). Politik tentunya telah mempengaruhi pola pikir, sikap dan tindakan politik sehari-hari. Pengaruh politik tersebut yang kemudian disebut sebagai budaya politik.

Untuk itu, penelitian mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan; 1. Persepsi mahasiswa Melayu pada FISIP UR terkait dengan politik, pileg dan pilpres sebagai implementasi kegiatan berpolitik; 2. Orientasi politik yang muncul pada mahasiswa Melayu pada FISIP UR; 3. Tipe budaya politik yang paling sesuai dengan Mahasiswa Melayu pada FISIP UR.

KERANGKA TEORI

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, tulisan ini menggunakan Teori Budaya Politik yang dikembangkan oleh Gabriel A. Almond dan Sidney Verba melalui buku *The Civic Culture* (1963) sebagai hasil berbagai survei mengenai sikap politik penduduk di AS, Jerman, Prancis, Italia dan Meksiko.

Pada prinsipnya budaya politik berusaha memadukan antara unsur budaya dan unsur politik dalam sebuah kajian yang baru. Oleh karena itu, sebelum membahas lebih lanjut tentang budaya politik, adalah lebih baik jika dikupas terdahulu apa itu budaya dan apa itu politik.

II.1. Budaya dan Politik

Budaya memang memiliki ragam definisi. Kata budaya berasal dari kata Sanskerta “BUDDHAYAH“, yang merupakan bentuk jamak dari kata “BUDDHI” yang berarti budi atau akal. Dengan demikian kebudayaan adalah “hal-hal yang bersangkutan dengan budhi atau akal”. Budaya juga diartikan lebih luas sebagai suatu kumpulan yang menyeluruh dari ilmu pengetahuan, kepercayaan, hukum, adat istiadat, nilai-nilai, sikap/tingkah laku, hirarki, kesenian dan konsep tentang alam semesta yang diperoleh seseorang sebagai anggota masyarakat dan dari generasi ke generasi melalui proses pembelajaran sosial. Melalui budaya maka akan hadir di benak masing-masing orang bahwa ia dan kelompoknya berbeda dengan kelompok yang lain.

Sementara itu, politik merupakan usaha menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis. Politik juga diartikan sebagai Negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan dan pembagian atau alokasi.³

Dengan demikian secara asal kata dapat diartikan bahwa budaya politik adalah bagian dari kebudayaan masyarakat yang berciri khas mengenai legitimasi, pengaturan kekuasaan, proses pembuatan kebijaksanaan pemerintah, kegiatan-kegiatan partai politik dan perilaku aparat pemerintah serta fenomena-fenomena yang muncul di masyarakat terhadap kekuasaan yang sedang berkuasa.⁴

II.2. Tipe Orientasi Politik

Lebih lanjut, dikatakan bahwa budaya politik merupakan pola sikap seseorang—sebagai bagian dari masyarakat⁵—dan orientasinya terhadap kehidupan politik. Pola sikap dan orientasi ini dipengaruhi oleh perasaan keterlibatan dan penolakan terhadap kehidupan politik; bersifat menilai objek dan peristiwa politik; dan diperolehnya dari pengetahuan mengenai kehidupan politik.⁶

Orientasi politik yang hadir pada diri seseorang dapat dikelompokkan atas:⁷

1. Orientasi kognitif (*parochial*); yakni pengetahuan dan kepercayaan seseorang terhadap politik, peran dan kewajibannya, serta input dan output dari politik.

³ Miriam Budiardjo. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008. Halaman 15-17

⁴ Albert Widjaja. *Budaya Politik dan Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: LP3ES, 1982. Halaman 8

⁵ Masyarakat merupakan gabungan dari individu-individu yang berada dalam sebuah komunitas dan mendiami sebuah wilayah yang sama dengan waktu yang cukup lama dan mempunyai aturan-aturan bersama untuk mencapai tujuan mereka. Lebih lanjut lihat Drs. Joko Tri Prasetya, et.al. *Ilmu Budaya Dasar*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991. Halaman 35-36.

⁶ Efriza. *Op.cit.* halaman 106

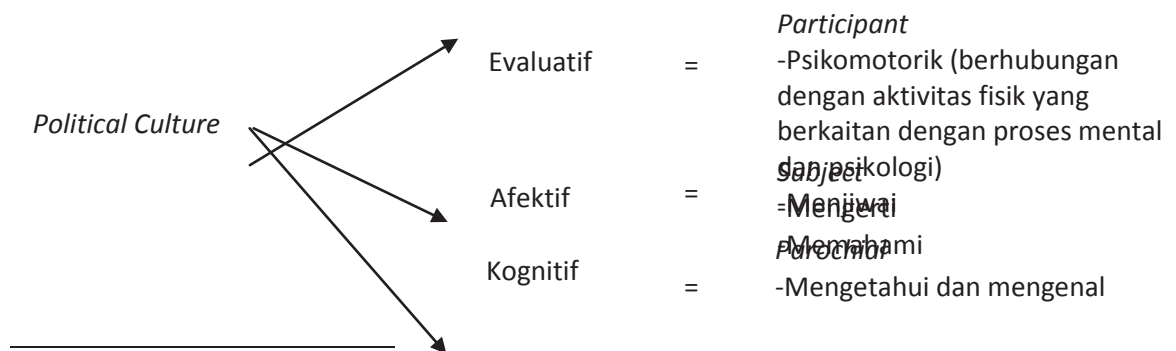
⁷ Gabriel Almond dan Sidney Verba. *Budaya Politik: Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara*. Terj Sahat Simamora. Jakarta: Bumi Aksara, 1984. Halaman 16-17 dan Efriza, *ibid*, halaman 109-111

Orientasi kognitif ini bisa dicontohkan dengan pemilihan politik seseorang terhadap parpol/caleg dan capres-cawapres tertentu pada pemilu yang hanya berdasarkan pengetahuan seseorang tersebut terhadap simbol parpol/caleg atau wajah capres-cawapres. Pengetahuan itu tidak dilandasi oleh pemahamannya terhadap visi dan misi parpol/caleg atau capres-cawapres.

2. Orientasi afektif (*subject*); yakni perasaan seseorang terhadap sistem politik, peranannya, para aktor dan penampilannya. Orientasi afektif ini bisa dicontohkan dengan pilihan politik individu terhadap parpol/caleg dan capres-cawapres tertentu, selain berdasarkan pengetahuannya tentang simbol parpol/caleg dan wajah capres-cawapres tertentu juga dibarengi dengan pengetahuan yang memadai tentang visi dan misi parpol/caleg dan capres-cawapres tertentu. Namun, ketetapan hati terhadap parpol/caleg dan capres-cawapres tersebut tidak diiringi oleh aktif berperan-sertanya dia dalam kegiatan politik parpol/caleg dan capres-cawapres yang dipilihnya, baik itu dalam bentuk sosialisasi politik ataupun menjadi anggota dari parpol/caleg atau menjadi tim pemenangan capres-cawapres. Individu tersebut lebih cenderung menjadi simpatisan dan pemilih pasif. Dengan kata lain, individu-individu tersebut memang telah memiliki kesadaran berpolitik yang lebih baik namun di sisi lain mereka tidak mau terlibat secara langsung dalam kegiatan berpolitik.
3. Orientasi evaluatif (*participant*); yakni keputusan dan pendapat seseorang tentang obyek-obyek politik yang melibatkan kepaduan dari standar nilai dan kriteria dengan informasi dan perasaan. Orientasi ini dapat dicontohkan dengan aktifnya seseorang dalam kegiatan politik dengan cara memilih parpol/caleg atau capres-cawapres yang diketahui dan dipercayainya berdasarkan simbol, program, visi dan misi. Pengetahuan dan kepercayaannya tersebut kemudian mendorongnya untuk terlibat secara sadar, aktif dan langsung dalam memperjuangkan program, visi dan misi parpol/caleg atau capres-cawapres.

Ketiga orientasi politik ini dapat digambarkan dalam tabel dibawah ini:

“Tipe-Tipe Orientasi Politik Individual”⁸



⁸ Efriza, *ibid*, halaman 111

Orientasi-orientasi politik tersebut ditujukan pada obyek-obyek politik yang terbagi atas⁹:

1. sistem politik secara umum, termasuk pengetahuan, perasaan dan sikap evaluasi terhadap bangsa dan negara, dengan perhatian khusus pada tiga golongan obyek-obyek, yakni:
 - a. peranan atau struktur khusus, seperti; badan legislatif, eksekutif dan birokrasi,
 - b. pemegang jabatan, seperti; pemimpin monarki, legislator dan administrator,
 - c. kebijaksanaan, keputusan, atau penguatan keputusan, struktur, pemegang jabatan dan struktur secara timbal balik yang dapat dikategorikan sebagai proses atau *input* dan proses administratif atau *output* politik.
2. Pribadi aktor politik yang meliputi nilai-nilai politik seseorang dan isi dan kualitas kemauan diri setiap orang dalam berhadapan dengan sistem politik.

II.3. Tipe Budaya Politik

Dari orientasi-orientasi politik individu dan obyek-obyeknya diatas, maka Gabriel Almond dan Sidney Verba kemudian menghasilkan tipe-tipe budaya politik yang terdiri atas:

1. Kebudayaan Politik Parokial (*Parochial Political Culture*), yaitu tipe budaya politik dengan tingkat partisipasi politiknya sangat rendah yang disebabkan faktor kognitif yang sangat rendah. Tipe budaya politik parokial memiliki ciri-ciri:
 - a. terdapat dalam sistem politik yang tradisional dengan dengan spesialisasi dan tugas aktor-aktor politik belum khusus sehingga aktivitas dan peran politik dilakukan bersamaan dengan peran di bidang ekonomi, sosial dan keagamaan atau spiritual,
 - b. tidak adanya minat masyarakat terhadap obyek politik,
 - c. tidak adanya harapan-harapan terhadap perubahan-perubahan dari sistem politik
 - d. pranata, tata nilai dan unsur-unsur adat lebih banyak dipegang teguh daripada persoalan pembagian peran politik.
 - e. kepala suku atau pemimpin adat adalah pemimpin politik sekaligus juga pemimpin adat, agama dan sosial masyarakat.
2. Kebudayaan Politik Subyek/Kaula (*Subject Political Culture*), yaitu tipe budaya politik dengan masyarakat yang sudah relatif maju secara sosial maupun ekonomi namun masih bersifat pasif. Tipe budaya politik subyek/kaula memiliki ciri-ciri:
 - a. frekuensi terhadap sistem politik sudah tinggi, namun perhatian dan intensitas partisipasi terhadap input dan output masih rendah.
 - b. terdapat pemerintah dan otoritasnya yang disadari oleh para subyek/kaula (masyarakat)

⁹ Gabriel Almond dan Sidney Verba. *Op.cit.* halaman 17 dan dan Efriza, *ibid*, halaman 112-113

- c. masyarakat menganggap dirinya sebagai subyek/kaula yang pasif yang tidak dapat mempengaruhi dan memberikan perubahan terhadap sistem, sehingga,
 - d. keputusan dan kebijakan pejabat (pemerintah) adalah mutlak, tidak dapat diubah-ubah, dikoreksi dan apalagi ditentang,
 - e. apabila terdapat ketidaksukaan terhadap sistem politik yang berlaku biasanya hanya disimpan dalam hati dan masyarakat harus merasa puas dan pasrah.
3. Kebudayaan Politik Partisipan (*Participant Political Culture*), yaitu tipe budaya politik ditandai dengan kesadaran politik yang sangat tinggi.
- a. perhatian terhadap input dan output dari sistem politik sangat tinggi,
 - b. diri individu dan orang lain dianggap sebagai anggota aktif dalam sistem politik,
 - c. masyarakat menyadari dan merealisasikan hak-hak politiknya, sehingga
 - d. mereka tidak begitu saja menerima hasil keputusan (adanya *check and balances*),
 - e. masyarakat secara aktif turut menjaga sistem politik yang ada.

METODE PENELITIAN

Lebih lanjut, penelitian ini merupakan Penelitian Deskriptif (*Descriptive Research*) dan penelitian non-eksperimen yang menggambarkan dan menginterpretasikan objek apa adanya tanpa ada kontrol dan memanipulasi variabel penelitian.¹⁰ Kemudian, sampel responden diambil dengan cara *non random* atau tidak acak yang tidak memberikan kesamaan peluang bagi setiap unsur populasi untuk dipilih sebagai sampel tanpa menentukan kesalahan sampling dan ukuran sampel.¹¹

Dengan demikian, penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dimana data dinyatakan dalam bentuk verbal (wawancara) sebagai interpretasi responden yang tercatat dan tanpa menggunakan teknik statistik. Selain data tersebut, penelitian ini juga menggunakan data-data tertulis, baik dari berbagai buku, jurnal ataupun situs yang relevan dengan penelitian.

Setelah terkumpul, data-data tersebut dianalisis secara induktif dan diinterpretasikan dengan pengetahuan intelektual yang didasarkan pada fakta, data dan informasi untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang menyuluh.

Sasaran dan lokasi yang dijadikan penelitian ini adalah masyarakat Melayu yang berada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Riau (UR). Budaya politik tersebut dikaitkan dengan pengetahuan, pemahaman, perasaan dan tindakan responden dalam aspek:

- ✓ Urgensitas Politik
- ✓ Pemilihan Umum (Pemilu)

¹⁰ Etta M Sangadji dan Sopiah. *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Yogyakarta: ANDI, 2010. Hal. 21 dan 24

¹¹ Purwanto. *Statistikan untuk Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011. Hal. 74-75

- ✓ Partai Politik (Parpol) dan Calon Legislatif (Caleg)
- ✓ Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Karakteristik Responden dan Inti Pertanyaan

Penentuan responden dilakukan secara non acak (non random) dengan pembatasan pada usia diantara 17 hingga 25 tahun, dengan tingkat pendidikan minimal SMA dan berstatus mahasiswa. Batasan yang terkait responden hanyalah pada aspek Melayu atau bukan Melayu yang menjadi fokus penelitian.

Jumlah responden sampel yang diambil adalah 50 orang dengan mempertimbangkan kesanggupan peneliti dalam mengumpulkan data dengan kondisi yang berasap dan tidak mengganggu kesehatan akibat asap yang tetap menebal tersebut.

Dari data yang terkumpul diketahui bahwa:

- a. Jenis kelamin laki-laki sebanyak 25 orang dan jenis kelamin perempuan sebanyak 25 orang
- b. Responden yang berumur 17 tahun sebanyak 3 orang, berumur 18 tahun sebanyak 16 orang, berumur 19 tahun sebanyak 10 orang, berumur 20 tahun sebanyak 12 orang, dan lebih dari 20 tahun sebanyak 9 orang.

Pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian ini dikategorikan atas empat aspek, yakni; politik, pemilihan umum, partai politik dan calon legislatif, dan calon presiden dan calon wakil presiden. Oleh karena itu, sebelum menentukan tipe budaya politik yang dimiliki mahasiswa Melayu yang berada di FISIP UR, penelitian ini akan memaparkan keempat aspek diatas.

Kemudian, dari pengklasifikasian berdasarkan aspek-aspek diatas, akan ditentukan orientasi-orientasi budaya politik yang muncul dari responden-responden yang terdiri atas orientasi kognitif, orientasi afektif dan orientasi evaluatif. Dari penentuan orientasi yang dimiliki oleh responden, barulah penelitian menarik kesimpulan terkait tipe budaya politik yang dimiliki oleh mahasiswa Melayu di FISIP UR.

2. Aspek-Aspek Penelitian

i. Urgensi Politik

Berbicara *urgensi politik* seluruh mahasiswa Melayu yang berada pada FISIP UR menyatakan bahwa politik memang diperlukan dan penting dalam kehidupan, bahkan ada sebagian diantara responden yang menyatakan bahwa politik *sangat* diperlukan dan *sangat* penting.

Namun, ketika dikaitkan lebih spesifik dengan *politik di Indonesia*, para responden memiliki pendapat yang berbeda. Mayoritas responden (60 %) menyatakan bahwa politik di Indonesia belum stabil/kacau, tidak transparan dan

penuh kecurangan serta dijadikan alat kepentingan untuk perorangan dan golongan. Sekitar 28 % responden mengutarakan bahwa politik Indonesia membingungkan/*complicated*, lucu dan sandiwara. Sisanya, 12 %, para responden mengatakan bahwa politik di Indonesia bagus dan sudah baik.

Informasi terkait perkembangan politik pun banyak diikuti oleh para responden dengan persentase 72 %. Informasi perkembangan politik diperoleh responden dari media massa seperti media cetak (koran) dan media elektronik (TV) serta media sosial seperti Twitter.

Informasi perkembangan politik bagi sebagian responden kuranglah menarik perhatian. Terdapat 12 % responden yang menyatakan kurang tertarik terhadap perkembangan politik dan tidak rutin mengikuti perkembangan politik. Angka lebih tinggi ditemui pada responden yang tidak mengikuti perkembangan politik dengan angka 16 %.

Terkait *media ketika berbicara tentang politik* para responden berbeda pendapat. Terdapat 72 % responden memberikan tanggapan negatif terkait bagaimana media berbicara tentang politik. Tanggapan mereka antara lain; media tidak independen, tidak jujur, suka mengada-ada. Sebaliknya, hanya 24 % yang menyatakan bahwa media ketika berbicara tentang politik sudah baik atau bagus. Selebihnya, sekitar 4 % responden juga tidak memberikan komentar atau tidak spesifik dalam berpendapat tentang bagaimana media dalam memberitakan politik.

ii. Pemilihan Umum (Pemilu)

Dalam menanggapi *sistem pemilihan umum* yang baru ini mahasiswa Melayu yang berada di FISIP UR yang dijadikan responden memiliki pendapat berbeda. Sebagian besar responden 76 % menyatakan setuju dengan sistem pemilihan yang baru. Hanya 24 % responden yang mengutarakan bahwa sistem pemilihan umum sekarang belum cocok.

Lebih lanjut, *sistem pemilihan umum langsung oleh rakyat* disetujui oleh 92 % responden. Selebihnya, 8 % responden mengatakan ketidaksetujuan mereka terhadap sistem pemilihan langsung.

Sikap apatis para pemilih dalam pemilihan umum ataupun *golput* (golongan putih) ditanggapi beragam oleh para responden. Terdapat 76 % responden memberikan respon menolak terhadap golput. 20 % responden memberikan respon mendukung terhadap golput, dan selebihnya, 4 % tidak memberikan respon.

Dalam pelaksanaannya hanya terdapat 16 % responden yang menjadi golput pada pelaksanaan pemilu terakhir. Sebaliknya, terdapat 80 % responden yang tidak golput pada pelaksanaan Sementara itu, terdapat 4 % responden yang abstain dengan tidak memberikan komentar apapun.

iii. Partai Politik (Parpol) dan Calon Legislatif (Caleg)

Dalam *mengenal dan mengetahui partai politik (parpol) dan calon legislatif (caleg) tertentu* 16 % responden menyatakan tidak mengetahui parpol dan caleg yang ikut serta dalam pemilihan legislatif lalu. Terdapat juga 2 % responden yang abstain yang tidak menjawab pertanyaan. Sisanya, 82 % responden menyatakan mengetahui dan mengetahui sebagian saja dari parpol dan caleg tersebut. Diantara mereka sudah mengetahui caleg dan hubungannya dengan partai tertentu.

Pertanyaan *Mengetahui visi dan misi parpol dan caleg tertentu* yang diajukan untuk pemilihan legislatif lalu ditanggapi bervariasi. Responden yang menyatakan tidak mengetahui visi dan misi yang dimiliki oleh parpol dan caleg tertentu mencapai sebanyak 40 %. Selebihnya, 58 % menyatakan mengetahui visi dan misi yang dimiliki parpol dan caleg tertentu. Disamping itu, terdapat 2 % yang abstain.

Aktif dalam kegiatan parpol dan caleg tertentu merupakan hal yang tidak dilakukan oleh sebagian besar responden. 88 % responden menyatakan tidak aktif dalam kegiatan parpol dan caleg tertentu. Sebaliknya, 10 % responden menyatakan aktif dalam kegiatan parpol dan caleg tertentu. Samping itu, terdapat juga 2 % responden yang abstain.

Pada pemilihan legislatif yang mendatang 86 % responden menyatakan akan ikut serta dalam pemilihan parpol dan caleg. Sebaliknya, hanya 12 % responden menyatakan tidak akan ikut serta dalam memilih dan tercatat 2 % yang abstain dengan tidak menjawab.

iv. Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres)

Beda pada mengenal dan mengetahui parpol dan caleg, beda pula dengan *mengenal dan mengetahui capres dan cawapres*. Pada pemilihan capres dan cawapres lalu terdapat 8 % responden yang tidak mengenal capres dan cawapres tertentu. Sebaliknya, terdapat 90 % responden yang telah mengetahui dan mengenal capres dan cawapres tertentu. Sedangkan yang abstain masih 2 % responden.

Dalam *mengetahui visi dan misi capres dan cawapres tertentu* para responden tidaklah sama. Terdapat 38 % responden yang menyatakan tidak mengetahui visi dan misi capres dan cawapres yang maju pada pilpres tahun lalu dan 2 % responden yang tidak menjawab pertanyaan yang diajukan. Dengan demikian, hanya 60 % responden yang menyatakan mengetahui ciri dan misi capres dan cawapres tertentu.

Aktif dalam kegiatan capres dan cawapres tertentu merupakan hal yang tidak dilakukan oleh sebagian besar responden. 92 % responden menyatakan tidak aktif dalam kegiatan capres/cawapres tertentu. Sebaliknya, 6 % responden menyatakan aktif dalam kegiatan capres/cawapres tertentu dengan menjadi saksi. Sedangkan terdapat juga 2 % responden yang abstain.

Pada pemilihan eksekutif yang mendatang 90 % responden menyatakan akan ikut serta dalam pemilihan capres dan cawapres. Sebaliknya, hanya 8 % responden menyatakan tidak akan ikut serta dalam memilih (menjadi golput) dan tercatat 2 % yang abstain dengan tidak menjawab.

3. Tipe Orientasi Politik

Setelah mengamati respon-respon yang diberikan para responden yang merupakan mahasiswa Melayu dan kemudian dikaitkan dengan tipe-tipe orientasi politik individu, ditarik kesimpulan bahwa mahasiswa Melayu yang berada pada FISIP UR sudah mencapai *tipe orientasi politik afektif*.

Walaupun sebenarnya ketiga tipe orientasi dimiliki oleh para responden, namun tetap saja tipe orientasi afektif yang lebih menonjol. Beberapa faktor yang dapat dijadikan alasan-alasannya, antara lain:

Pertama, bahwa mahasiswa Melayu pada FISIP UR telah memiliki pengetahuan dan kesadaran mendalam tentang pentingnya politik, pemilu dan sistem pemilu, peranannya dan peran aktor politik dalam kehidupan keseharian mereka. Lebih lanjut, mahasiswa Melayu pada FISIP UR telah mengetahui parpol atau caleg dan capres-cawapres serta simbol-simbol yang dibawa oleh masing-masing pihak peserta pemilu. Mereka telah dapat membedakan simbol-simbol yang dimiliki oleh parpol, caleg dan capres-cawapres tertentu.

Selain dapat membedakan simbol-simbol yang dipakai, para responden kebanyakan sudah mengetahui visi dan misi pihak-pihak yang terlibat dalam pemilu. Kedua pengetahuan ini—simbol dan visi dan misi—telah membuat mahasiswa Melayu pada FISIP UR mengetahui, memahami dan menjiwai perjuangan-perjuangan pihak-pihak yang terlibat dalam pemilihan umum. Kedua pengetahuan ini telah menimbulkan perasaan untuk ikut serta dalam pileg dan pilpres dan untuk memenangkan pihak-pihak yang dipikirkan dan dirasakan dapat mewakili aspirasi mereka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pengetahuan, pemahaman dan penjiwaan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam politik, tidak serta merta menjadikan mereka berkecimpung aktif dalam kegiatan politik. Malah sebaliknya, banyak responden yang lebih memilih untuk tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis yang dijalankan masing-masing pihak peserta pemilu.

Para responden memilih untuk tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis, baik itu yang dijalankan oleh parpol dan caleg tertentu ataupun oleh pasangan capres-cawapres. Mayoritas responden menyatakan tidak pernah terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan parpol dan caleg, serta capres dan cawapres tertentu. Dalam hal ini individu-individu yang ada dalam mahasiswa lebih memilih menjadi simpatisan dan pemilih pasif, yang sekedar ikut pemilihan tanpa berperan serta dalam proses menyebarkan visi dan misi pihak-pihak peserta pemilihan legislatif dan pemilihan eksekutif.

4. Tipe Budaya Politik

Berdasarkan tipe orientasi politik afektif yang dimiliki mahasiswa Melayu di FISIP UR, maka dapat disimpulkan bahwa tipe budaya politik yang sesuai adalah tipe *Kebudayaan Politik Subyek/Kaula (Subject Political Culture)*. Kesimpulan ini diambil dikarenakan beberapa faktor, yakni:

Pertama, mahasiswa Melayu telah menyadari perlu dan pentingnya politik dalam kehidupan. Untuk itu, mereka terus mengikuti perkembangan politik yang terjadi di Indonesia melalui berbagai media massa dan media sosial.

Walaupun kemudian, mereka berpendapat bahwa politik di Indonesia tidaklah berjalan sesuai yang mereka rasakan dan harapkan. Politik di Indonesia hanya untuk kepentingan pribadi dan golongan, manipulasi dan memprihatinkan. Media, dimana mereka sering memperoleh informasi terbaru terkait politik di Indonesia, dirasakan terlalu berlebihan, sering digunakan untuk pencitraan, berat sebelah dan tidak sesuai dengan kenyataan didalam memuat pemberitaan. Oleh karena itu, wajar jika muncul pesimisme pada mahasiswa Melayu di FISIP UR terkait politik di Indonesia dan media.

Meskipun politik di Indonesia dan media ketika memberitakannya dirasakan tidak sesuai dengan yang seharusnya, mereka tidak melakukan upaya yang konkrit dengan terlibat langsung dalam memperbaiki kondisi yang ada. Partisipasi politik ditunjukkan dengan cara aktif dalam mengikuti perkembangan politik dan menjadi pemilih pasif, yang hanya ikut serta dalam pemilihan umum tanpa terlibat dalam sosialisasi.

Kedua, orientasi terhadap sistem politik, dalam hal ini sistem pemilihan umum dan sistem pemilihan yang langsung dari rakyat, ditanggapi dengan pasif dan dirasa sudah nyaman. Meskipun demikian, frekuensi terhadap sistem politik sudah tinggi. Keikutsertaan dalam pemilu yang diselenggarakan negara, baik legislatif maupun eksekutif, di masa lalu ataupun di masa depan ditemukan meningkat. Selain itu, citra yang buruk terhadap sikap golput dan pelaku golput serta rendahnya angka menjadi golput telah menunjukkan bahwa responden sangat ingin berperan serta dalam sistem politik.

Anggapan bahwa sistem pemilihan langsung dari rakyat untuk menentukan masa depan negara sudah cocok dapat menjadi indikator bahwa mahasiswa Melayu pada FISIP UR menyadari adanya pemerintah dan otoritas negara lainnya. Selain itu, hal tersebut membuktikan bahwa mahasiswa Melayu pada FISIP UR peduli pada proses regenerasi dan pergantian politik yang stabil dan dinamis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PENUTUP

Kesimpulan

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa tipe orientasi yang melekat pada mahasiswa Melayu di FISIP UR termasuk kategori tipe orientasi afektif. Walaupun sebenarnya ketiga tipe orientasi dimiliki oleh para responden, namun tetap saja tipe orientasi afektif yang lebih menonjol.

Hasil tersebut diperoleh setelah mengetahui bahwa mahasiswa telah memiliki pengetahuan dan kesadaran mendalam tentang pentingnya politik, pemilu dan sistem pemilu, peranannya dan peran aktor politik dalam kehidupan keseharian mereka. Lebih lanjut, mahasiswa Melayu pada FISIP UR telah mengetahui parpol atau caleg dan capres-cawapres serta simbol-simbol yang dibawa oleh masing-masing pihak peserta pemilu. Mereka telah dapat membedakan simbol-simbol yang dimiliki oleh parpol, caleg dan capres-cawapres tertentu.

Selain dapat membedakan simbol-simbol yang dipakai, para responden kebanyakan sudah mengetahui visi dan misi pihak yang terlibat dalam pemilu. Kedua pengetahuan ini, simbol dan visi dan misi, telah membuat mahasiswa Melayu pada FISIP UR mengetahui, memahami dan menjiwai perjuangan-perjuangan pihak-pihak yang terlibat dalam pemilihan umum.

Pengetahuan, pemahaman dan penjiwaan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam politik, tidak serta merta menjadikan mereka berkecimpung aktif dalam kegiatan politik. Malah sebaliknya, banyak responden yang lebih memilih untuk tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis yang dijalankan masing-masing pihak peserta pemilu.

Para responden memilih untuk tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis, baik itu yang dijalankan oleh parpol dan caleg tertentu ataupun oleh pasangan capres-cawapres. Mayoritas responden menyatakan tidak pernah terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan parpol dan caleg, serta capres dan cawapres tertentu. Dalam hal ini individu-individu yang ada dalam mahasiswa lebih memilih menjadi simpatisan dan pemilih pasif, yang sekedar ikut pemilihan tanpa berperan serta dalam proses menyebarkan visi dan misi pihak-pihak peserta pemilihan legislatif dan pemilihan eksekutif.

Setelah diketahuinya tipe orientasi politik, barulah dapat ditentukan tipe kebudayaan politik sebagaimana yang diajukan oleh Gabriel A. Almond dan Sidney Verba. Hal ini dapat terjadi karena tipe kebudayaan politik sangat dipengaruhi oleh orientasi politik yaitu afektif, kognitif dan evaluatif.

Oleh karena itu, setelah mengetahui orientasi politik yang menonjol dalam mahasiswa Melayu pada FISIP UR, yakni orientasi afektif, maka disimpulkan bahwa tipe kebudayaan politik yang mengemuka adalah tipe kebudayaan politik subyek/kaula.

Kesimpulan ini diambil dikarenakan beberapa faktor, yakni:

Pertama, kesadaran tinggi mahasiswa Melayu terhadap perlu dan pentingnya politik dalam kehidupan. Kesadaran tinggi terkait politik diwujudkan dengan terus mengikuti perkembangan politik yang terjadi di Indonesia melalui berbagai media massa dan media sosial.

Walaupun mereka menyadari bahwa politik di Indonesia dan media ketika memberitakannya mengecewakan dan memberikan pesimisme, mereka tidak melakukan upaya yang konkrit dalam memperbaiki kondisi yang ada dengan terlibat langsung dalam kehidupan politik praktis. Bahkan mayoritas mahasiswa Melayu di FISIP UR juga tidak memilih untuk mengambil bahagian dari proses politik dalam pileg atau pilpres dengan menjadi aktivis partai atau capres-cawapres tertentu. Partisipasi politik ditunjukkan dengan cara aktif dalam mengikuti perkembangan politik dan menjadi pemilih pasif, yang hanya ikut serta dalam pemilihan umum tanpa terlibat dalam sosialisasi politik.

Kedua, sistem politik—dalam hal ini sistem pemilihan umum dan sistem pemilihan yang langsung dari rakyat—ditanggapi dengan pasif dan dirasa sudah nyaman. Meskipun demikian, frekuensi terhadap sistem politik sudah tinggi dibuktikan dengan keikutsertaan dalam pemilu yang diselenggarakan negara, baik legislatif maupun eksekutif, di masa lalu ataupun di masa depan ditemukan meningkat. Disamping itu, persepsi yang negatif terhadap perbuatan dan pelaku golput juga menunjukkan bahwa mahasiswa Melayu pada FISIP UR akan proses politik yang terjadi.

Anggapan bahwa sistem politik sudah cocok dan keikutsertaan yang tinggi dalam sistem politik mengindikasikan bahwa mahasiswa Melayu pada FISIP UR menyadari adanya pemerintah dan otoritas negara lainnya. Oleh karena itu, dapatlah dikatakan bahwa mahasiswa Melayu pada FISIP UR peduli terhadap proses pergantian politik yang stabil, dinamis dan konstitusional didalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Almond, Gabriel dan Sidney Verba. *Budaya Politik: Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara*. Terj Sahat Simamora. Jakarta: Bumi Aksara, 1984
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Creswell, John W. *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches*. Sage Publications: 1994.
- Efriza. *Political Explore: Sebuah Kajian Ilmu Politik*. Bandung: CV Alfabeta, 2012.
- Faisal, Sanapiah. *Format-format Penelitian Sosial: Dasar-dasar dan Aplikasi*. Jakarta: Rajawali, 1989.
- Janoski, Thomas, et. al (editor). *The Handbook of Political Sociology: States, Civil Societies, and Globalization*. New York: Cambridge University Press, 2005.
- Marijan, Kacung, Prof, DR. *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*. Jakarta: Kencana, 2010
- Purwanto. *Statistika untuk Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Ridjal, Fauzie dan M. Rusli Karim (editor). *Dinamika Budaya dan Politik dalam Pembangunan*, Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya dan Yayasan Hatta, 1991.
- Sangadji, Etta M dan Sopiah. *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Yogyakarta: ANDI, 2010.
- Sitepu, P. Anthonius. *Studi Ilmu Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- *Teori-Teori Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012
- Tri Prasetya, Drs. Joko, et.al. *Ilmu Budaya Dasar*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991.
- Widjaja, Albert. *Budaya Politik dan Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: LP3ES, 1982

Situs-situs

<http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbaseh/2013/12/23/pelajaran-dari-kisah-meurah-pupok/>

<http://kpu.go.id/dmdocuments/15%20Parpol%20peserta%20pemilu.pdf>,

<http://riau1.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id=478>,

<http://www.riau.go.id/>

